

P I D A T O
PENYERAHAN DAN PENJELASAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2009

Yth. - Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

Yth. - Saudara Wakil Walikota.

Yth. - Rekan-rekan Muspida, Para pejabat lingkup Pemerintah Kota, hadirin dan undangan yang berbahagia.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pidato ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dapat bersama-sama hadir ditempat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan dan penjelasan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2009

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Menyikapi kondisi dan dinamika perkembangan Kota Kendari maka dalam rancangan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2009 yang merupakan implemetasi hasil penjaringan aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2009 yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti perkembangan kondisi dinamika obyektif sehingga perlu adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2009 adalah untuk mengakomodir terjadinya kondisi dan dinamika perkembangan program dan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, RKPD, RPJMD, RPJP serta memperhatikan Kebijakan Nasional Tahun 2009. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009 akan memuat alokasi sumber daya

yang tercatat dan terukur baik pada sector pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Dewan, Hadirin dan Undangan yang terhormat,

Dari gambaran kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta tantangan yang di hadapi tahun 2009, maka tema pembangunan tahun 2009 adalah :

”Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan”

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 8 (delapan) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh SKPD dan apartur pelaksana, yaitu:

- 1) Pengarusutamaan peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan (*Environment*)**

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

2) Pengarusutamaan peningkatan fungsi Kota Kendari sebagai Kota Pelayanan Skala Regional dan Terpenuhinya Tingkat Kebutuhan Masyarakat (*Environment, Employment, Engagement*)

Sasaran dari prioritas ini adalah meningkatkan fungsi Kota Kendari sebagai kota pelayanan skala regional khususnya wilayah Sulawesi Tenggara dalam bidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pariwisata dan agribisnis, melalui penguatan infrastruktur di sektor jalan kota, kelistrikan dan air bersih

3) Pengarusutamaan peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2010 (*Equity, Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terpenuhinya sasaran angka derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2010, meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat

4) Pengarusutamaan peningkatan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pelestarian Nilai-Nilai Budaya (*Ethic, Employment dan Equity*)

Sasaran pada prioritas ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi sekolah SD dan SLTP, meningkatnya mutu pendidikan serta terwujudnya organisasi sekolah sebagai unit pelayanan terdepan pendidikan yang profesional, partisipatif, transparan, efisien dan akuntabel.

5) Pengarusutanaan peningkatan Rasa Aman, Sikap Hidup yang Tertib dan Disiplin bagi Seluruh Warga Masyarakat (*Ethic, Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah meningkatnya rasa aman bagi seluruh warga masyarakat, berkurangnya angka kejahatan (dengan kekerasan) dan kriminal lainnya, meningkatnya sikap hidup yang tertib dan disiplin warga kota utamanya di tempat dan sarana publik, serta meningkatnya peranserta masyarakat pada semua tahap pembangunan: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan

6) Pengarusutamaan penegakkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Penegakan Supremasi Hukum (*Ethic, Equity dan Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang berpijak pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

7) Pengarusutamaan peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif dan Adil bagi semua Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran (*Environment, Employment, Engagement dan Equity*)

Segala upaya pembangunan yang dilakukan, harus diorientasikan pada Penguatan ekonomi masyarakat. Strategi penguatan ekonomi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi, mulai dari pemberian peluang kesempatan ekonomi yang merata, akses masyarakat terhadap permodalan, perlindungan pasar hingga wujud kelembagaan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar. Disamping itu, Pemerintah Kota akan berupaya mendorong kemudahan investasi dari masyarakat maupun swasta, dalam rangka memperluas cakupan dan daya serap tenaga kerja.

8) Pengarusuataan peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah (*Ethic dan Engagement*)

Sasaran pada prioritas ini adalah terbentuknya sistem kerja dan struktur organisasi pemerintah yang efisien dan efektif, meningkatkan kapasitas DPRD sebagai mitra eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur

Para Anggota dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai kebijakan ekonomi makro serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2009 adalah Pertumbuhan ekonomi sebesar diatas 8,00 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan stabilitas ekonomi, maka secara teoritis pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan akan turun dari tahun sebelumnya yang dihitung dari jumlah angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi dibawah angka 33,84 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong dengan meningkatkan investasi, dari tahun ke tahun baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam tahun 2009, perekonomian diperkirakan tumbuh diatas 8,00 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2008 (antara 7,0 - 8,0 persen). Dalam tahun 2009, dengan terjaganya stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat membaik dengan konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh diatas 10 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 5 persen. sektor pertanian tumbuh sebesar 5,50 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12 persen, sektor industri pengolahan sebesar 9 persen; sektor listrik, gas dan air sebesar 10 persen, sektor konstruksi sebesar 11 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6,5 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 14 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 6,5 persen

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpang pembagian porsi pembangunan untuk

menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Ppemberdayaan di Kota Kendari kepada masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan di harapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat.

Rapat Paripurna dewan, yang terhormat,

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Kota, rapat koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

KUA Tahun 2009 merupakan acuan bagi SKPD untuk penyusunan RKA-SKPD untuk menjadi Rancangan APBD yang selanjutnya akan dibahas bersama oleh legislatif dan eksekutif sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dari gambaran Kebijakan Umum Anggaran tersebut diatas selanjutnya di tindak lanjuti dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2009 yang memuat tentang gambaran jumlah kemampuan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dimana kebijakan belanja daerah pada perlu dilakukan pemilahan dan identifikasi berdasarkan urutan prioritas mengingat keterbatasan daerah untuk mebiayai dan mengakomodir usulan

belanja perubahan dari SKPD baik pendapatan maupun pengeluaran.

Berdasar kebijakan umum APBD tahun 2008, maka perlu saya menyampaikan penjelasan secara kumulatif komposisi Rancangan APBD dengan melihat kondisi obyektif kemampuan pendapatan yang dapat dimasukkan dalam APBD sebagai berikut; struktur pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD Kota Kendari tahun anggaran 2009 dengan jumlah Rp. 489.778.591.378,00 (*empat ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) terdiri dari: pendapatan asli daerah sendiri (PADs) sebesar Rp.28.795.375.717,- (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*) dana perimbangan sebesar Rp.437.483.215.661,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.23.500.000.000,00 (*dua puluh tiga milyar lima*

ratus juta rupiah) sedangkan, perkiraan belanja pada tahun 2009 adalah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 369.997.004.355,00 (*tiga ratus enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) belanja langsung Rp. 188.639.024.429,00 (*seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah* sehingga dengan demikian direncanakan Rancangan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 558.636.028.784,00 (*lima ratus lima puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) adapun rincian dari rencana prioritas plafon anggaran sementara terjabar dalam dokumen PPAS yang akan diserahkan pada Dewan yang terhormat.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang berbahagi

Demikian Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2009 yang secara resmi saya serahkan hari ini kepada

anggota Dewan yang terhormat untuk dibahas dan selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui Rancangan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.

Akhirnya melalui kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti, penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Kota Kendari Tahun Anggaran 2009, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-NYA kepada kita semua dalam mengemban tugas pengabdian kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat yang Kita cintai.

Sekian dan terima kasih

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kendari, Oktober 2008

WALIKOTA KENDARI

Ir. H. A S R U N, M.Eng.Sc